

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN PROFESIONALISME APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* (GGG)

**Dr. Leny Nofianti MS, SE. M.Si, Ak¹
Anggrieta Denziana, SE. MM, Ak²**

The research was intended to examine the influence of implementation of the competence of local government Apparatus and the Professionalism Of Internal Functional Controlling Agency toward implementation Good Government Governance/GGG.

The research methods used in this research was the explanatory research. Sampling techniques used was Proportionate Stratified Cluster Random Sampling. The samples obtained in this research was 57 Local Government Unit Agencies (SKPD). The primary data were collected by questionnaires. Validity and reliability of the questionnaire was tested first before testing hypotheses was performed. The analysis technique used in this research was a Structural Equation Modelling (SEM) or variance-based component that was made famous by Partial Least Squares (PLS).

Based on the results of data analysis and discussion, it was obtained the following research findings The significance level of 5% can be inferred implementation of the competence of local government Apparatus and the Professionalism Of Internal Functional Controlling Agency significantly effect to the implementation of Good Government Governance/GGG.

Keywords: The Competence Of Local Government Apparatus, Professionalism Of Internal Functional Controlling Agency, Good Government Governance (GGG)

I. PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.

Tantangan untuk merealisasikan tujuan di atas sangatlah berat, mengingat perilaku usaha dan pelayanan publik yang harus dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Hasil penelitian *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* dalam kurun waktu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, peringkat korupsi Indonesia meningkat dari skor 7,98 tahun 2008, skor 8,32 tahun 2009 dan naik menjadi skor 9,07 dari nilai 10 tahun 2010 dibanding dengan 16 negara Asia Pasifik lainnya. Posisi ke-3 di tahun 2008 dan posisi pertama pada tahun 2009 dan 2010. Selain itu, menurut penelitian tersebut masalah korupsi juga terkait erat dengan birokrasi. Hal ini berarti birokrasi Indonesia dinilai terburuk.

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau

² Mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi UNPAD & Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung (UBL)

Implementasi *good governance* masih perlu diusahakan, disebabkan oleh akuntabilitas yang belum berjalan sepenuhnya.

Transparency International Indonesia (TII) Tahun 2010 melakukan survei untuk mengetahui praktik korupsi di sektor publik. Hasil survei TII tersebut menempatkan Kota Pekanbaru pelayanannya terkorup di Indonesia, yaitu tingkat korupsi di Kota Pekanbaru dan Cirebon paling tinggi di antara 50 kota besar di Indonesia, sama-sama berada pada skor IPK sebesar 3,61. Dua kota tersebut dinilai masih banyak terdapat praktik-praktik korupsi dan ini membentuk persepsi pelaku bisnis. Rentang indeks antara 0 sampai dengan 10; 0 berarti dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih.

Reformasi yang berlangsung telah memberikan warna dan pengaruh pada administrasi publik, yaitu untuk menempatkan kembali fungsi aparatur pemerintahan selaku pelayan publik. Untuk mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pengelolaan pelayanan publik. Masalah yang dihadapi pemerintah saat ini adalah keterbatasan aparatur Pemda yang berkualitas, ini menjadi suatu fenomena yang sekaligus menjadi masalah utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia (Enceng, dkk ; 2008)

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Meskipun sudah ada kewajiban APIP untuk melaksanakan reviu atas laporan keuangan sebelum disampaikan kepada BPK untuk diaudit, tetapi sampai saat ini, pelaksanaan reviu tersebut ternyata masih belum sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya laporan keuangan pemerintah baik di tingkat kementerian maupun di tingkat daerah yang masih mendapatkan opini *disclaimer* dari BPK (Wahyudi, 2010)

APIP berperan dalam mengawal penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan pencapaian target-target pembangunan nasional. APIP, yang meliputi Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat pada Kementerian Lembaga dan Inspektorat di daerah diharapkan dapat berperan sebagai *quality assurance* atas kegiatan pelaksanaan pembangunan, sehingga pimpinan Instansi Pemerintah akan memperoleh keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan pembangunan (Budiono, 2010). Budiono (2010) juga meminta kepada APIP agar meningkatkan kerja samanya dengan seluruh jajaran instansi pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) untuk menerapkan SPIP secara optimal sesuai dengan *time frame* yang ditetapkan serta merancang suatu *action plan* pembinaan SPIP salah satunya dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APIP.

Pada tahun 2009 BPK RI menemukan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) Fiktif dienam SKPD Senilai Rp 2,4 miliar. Keenan SKPD yang terdapat temuan SPPD fiktif adalah Sekretariat DPRD Riau, Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau (Utusan riau, 2011).

Selanjutnya, ribuan temuan BPK ternyata masih belum ditindaklanjuti oleh berbagai Satuan Kerja (Satker), baik di lingkungan Pemprov Riau, maupun Pemkab dan Pemko se-Riau. Temuan BPK RI Perwakilan Riau yang belum ditindaklanjuti itu adalah pemantauan untuk pemerintah daerah di Riau pada semester I TA 2010. Jumlah rekomendasi sebanyak 4.609, di antaranya sebanyak 2.445 atau 53,05 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sebanyak 984 rekomendasi atau 21,35 persen telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai rekomendasi. Dan sebanyak 1.180 atau 25,60 persen belum ditindaklanjuti. Hal ini menyebabkan Inspektorat menyurati Bupati/wako se-Riau (BPK, 2010).

Menurut Sembodo (2009) Sistem pembukuan dan pencatatan yang dilakukan masing-masing SKPD dinilai tidak profesional oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, terutama untuk SKPD di Kabupaten Pelalawan yang disampaikannya pada acara serah terima laporan dari Kepala BPK Perwakilan Riau kepada ketua DPRD Pelalawan.

Penelitian ini dimotivasi antara lain karena: 1) Isu *Governance* yang masih hangat dalam penerapan *Good Government Governance* (GGG). 2) Semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia melibatkan aparatur Pemda. Penelitian ini memiliki keunikan dari objek penelitian, terutama pada *dependen* variabelnya, seperti yang dinyatakan oleh Skaran (2010) bahwa salah satu karakteristik yang menjadi objek perhatian adalah *dependen* variabel, dalam penelitian ini adalah *Good Government Governance* (GGG). Peneliti tertarik untuk meneliti topik ini juga karena masih sedikitnya penelitian tentang GGG di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi langsung bagi Pemda setempat dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan fenomena penelitian di atas, dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah terhadap penerapan *Good Government Governance* (GGG)”. Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian untuk menguji secara empirik atas dugaan tersebut.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Government Governance*

Teori *Governance* dikemukakan oleh Stoker (1998) dalam *International Social Science Journal* dengan judul “*Governance as Theory: Five Propositions.*”. Stoker (1998) mengemukakan bahwa :

Governance refers to the development of governing styles in which boundaries between and within public and private sectors have become blurred. The essence of governance is its focus on mechanisms that do not rest on recourse to the authority and sanctions of government..., Governance for (some) is about the potential for contracting, franchising and new forms of regulation. In short, it is about what (some) refer to as the new public management. However, governance, ...is more than a new set of managerial tools. It is also about more than achieving greater efficiency in the production of public services (1998, p. 17-18).

Menurut Stoker (1998) *governance* merupakan perkembangan dari gaya pemerintahan, yang mana batas antara sektor publik dan sektor swasta sudah kabur. Esensi *governance* difokuskan pada mekanisme yang tidak bergantung pada penggunaan otoritas dan sanksi dari pemerintah, *governance* merupakan bentuk baru dari peraturan menuju *New Public Management* (NPM). *Governance* merupakan lebih dari satu set alat manajerial untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik.

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Kompetensi menurut Boutler *et al.* (1999) merupakan karakteristik yang mendasari seseorang untuk mampu menunjukkan suatu prestasi kerja yang baik dalam bidang pekerjaan, peran atau situasi tertentu. Menurut Cheng *et al.* (2002) kompetensi adalah seseorang yang memiliki *knowledge* (pendidikan, keahlian dan pengalaman) dan perilaku etis dalam bekerja. Cheng *et al.* (2002) menyatakan kompetensi meliputi empat komponen yaitu *functional expertise, Broad sector prespective, leadership qualities, and personal atributes*. Hal tersebut sejalan dengan Nur Afiah (2004), komponen kompetensi meliputi Pengetahuan, Pengalaman, Mutu kepemimpinan berupa etika subjektif dan etika objektif dan keterampilan. Pengetahuan diperoleh dari pendidikan, keahlian, dan pelatihan.

Untuk menegakkan profesionalitas dan moralitas tersebut maka aparatur pemerintah daerah harus melakukan 2 tindakan, yaitu: pertama, melakukan peningkatan kemampuan fisik, rasionalitas, dan daya pikir melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan diri yang

dilakukan secara simultan. Kedua, ketangguhan moralitas-moralitas dalam memegang amanah yang diembannya. Perlu digarisbawahi bahwa citra (*image*) masyarakat terhadap aparat pemerintah daerah pasti positif bila kedua pihak bersifat profesional dan bermoral.

Professionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Pada pemerintahan auditor intern pemerintah dibutuhkan untuk mengawasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fungsi dari auditor intern pemerintah adalah mengawasi seluruh kebijakan pemerintah serta memberikan masukan berupa rekomendasi atas temuannya agar bisa dilakukan perbaikan. Auditor intern dapat membantu mengeliminasi terjadinya kesalahan dalam organisasi. Adapun ruang lingkup tanggungjawab auditor intern pemerintah daerah adalah mengenai: (1) Keandalan informasi, (2) kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku, (3) perlindungan terhadap harta, (4) penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien, (5) Pencapaian tujuan (Bastian, 2011)

Greenwood (1957), Gode (1957) dalam Kalbers dan Fogarty (1995) berpendapat bahwa profesionalisme berarti menunjukkan suatu pekerjaan yang memiliki seperangkat karakteristik tertentu. Dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan suatu profesi yang mana untuk dapat dikatakan seseorang itu profesional harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya memiliki keahlian, memiliki pengetahuan yang memadai, mematuhi kode etik dalam menjalankan tugas profesinya.

Kalbers & Fogarty (1995) dalam penelitiannya menggunakan dimensi profesionalisme yang dikemukakan oleh Hall, yang selanjutnya dirumuskan menjadi :

- a. Dedikasi terhadap profesi (*dedication*), dicerminkan melalui dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.
- b. Kewajiban sosial (*social obligation*), berkaitan dengan pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik untuk masyarakat ataupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
- c. Kebutuhan akan otonomi (*autonomy demand*), berkaitan dengan pandangan bahwa seorang yang profesional harus mampu untuk membuat keputusan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
- d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*self regulation*), berkaitan dengan sikap yakin bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi.
- e. Hubungan dengan sesama profesi (*community affiliation*), berkaitan dengan pentingnya ikatan profesi sebagai acuan termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan.

Good Government Governance (GGG)

World Bank (1997), mendefinisikan *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”

United Nation Development Program (UNDP) (1997) mendefinisikan *Governance* (kepemerintahan) sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”.

World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara. *Governance* mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *Good* dalam *governance* mengandung dua pengertian (BPKP, 2002:6) yaitu: (1) nilai-nilai yang

menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional untuk kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; (2) aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Menurut OECD kriteria *good governance* terdiri dari: *fairness, transparency, accountability, responsibility* (Sukrisno Agoes, 2004). Menurut Bank Dunia (Tjokroamidjojo, 2000) terdapat empat prinsip penting *good governance* yaitu *transparensy, accountability, predictability* yang sama dengan *rule of law dan participation*. Dalam penelitian ini diambil tiga pilar utama *good governance* menurut BPK (2004) yaitu (1) Transparansi (*transparency*); (2) Akuntabilitas (*accountability*); dan (3) Partisipasi (*participation*)

Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemda terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Kurtz and Schrank (2007) meneliti tentang *Growth and Governance: Models, Measures, and Mechanisms*. Penelitian ini menghubungkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kualitas administrasi publik (aparatur) serta pembangunan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan yang dominan pemerintahan yang bermasalah, menyebabkan bias persepsi, kebingungan dalam hal memilih kebijakan ekonomi.

Cornforth, C.J and Edwards. C. (1998) meneliti tentang “*Good Governance: developing effective board-management relations in public and voluntary organizations*”. Penelitian ini meneliti hubungan antara pimpinan dan manajemen dalam menjalankan tugas mereka secara efektif agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hood dan Lodge (2004) menganalisis kompetensi dan pemerintahan pada pegawai negeri senior di tingkat nasional di tiga negara (AS, Inggris dan Jerman), yang dijabarkan dalam “*Competency, Bureaucracy, and Public Management Reform: A Comparative Analysis*”. Kompetensi dianggap sebagai tema sentral dalam reformasi pelayanan publik, sehingga dengan menelusuri perkembangan kompetensi sebagai sebuah ide menunjukkan bahwa reformasi kompetensi menggambarkan ide-ide selektif dalam manajemen dan pelayanan publik sehingga tercapai tata kelola yang baik.

Penelitian yang melihat hubungan antara kompetensi aparatur Pemda dan *Good Government Governance* dilakukan oleh Nur Afiah (2004) mengenai Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, serta Kualitas Informasi Keuangan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik dengan hasil bahwa secara simultan dan parsial kompetensi anggota DPRD, kompetensi aparatur Pemda, pelaksanaan sistem informasi akuntansi, penganggaran dan kualitas informasi keuangan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintah daerah yang baik.

b. Pengaruh Professionalisme Pengawas Intern terhadap Penerapan *Good Government Governance*

Goodwin (2004) meneliti tentang *A comparison of internal audit in the private and public sectors*. Penelitian ini meneliti persamaan dan perbedaan antara internal audit di sektor publik dan di sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan status antara audit internal di kedua sektor, bahwa auditor internal sektor publik cenderung melaporkan kepada kepala keuangan. Sama untuk outsourcing, organisasi sektor publik lebih mungkin melakukan *outsourcing* dari pada sektor swasta terhadap auditor eksternal. Ada sedikit perbedaan antara aktivitas audit internal dan interaksi dengan audit eksternal dalam dua sektor. Namun, audit internal sektor swasta dianggap menghasilkan pengurangan yang lebih besar dalam biaya audit dibandingkan dengan sektor publik.

Pada tahun 2006 Goodwin *et al.*, melakukan survey di Perusahaan Australia yang terdaftar di bursa efek, dengan mengambil data dari informasi perusahaan yang terdaftar dan *corporate annual report*. Hasil study menunjukkan terdapat dukungan yang kecil antara audit internal dengan *corporate governance*. Marco Allegrini *et al.* (2006) melakukan kajian literatur tentang “*The European Literature Review on Internal Auditing*” dengan mencoba memahami lebih luas fungsi audit internal dalam menanggapi perubahan praktek bisnis global dan peran mereka dalam memperkuat tata kelola perusahaan.

Diamond (2002) dalam *IMF working paper* menyajikan tentang “*The role of Internal Audit in Government Financial Management: an International Perspektif*”, bahwa internal audit merupakan komponen yang penting dalam pemerintahan, manajemen keuangan, dan alat untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Leung *et al.* (2009) meneliti mengenai *The Role Of Internal Audit In Corporate Governance And Managemen*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran audit internal dalam tata kelola perusahaan dan manajemen. Rekomendasi dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa untuk memperkuat peran audit internal dalam tata kelola perusahaan harus difokuskan pada kemampuan audit internal dalam memberikan jaminan kepada manajemen dan komisi integritas berupa informasi, termasuk pemantauan semua internal sistem yang menghasilkan informasi pengendalian internal, identifikasi risiko dan penilaian manajemen serta proses komunikasi dan pemberian nasihat yang tepat waktu kepada manajemen dan Dewan.

O'Regan (2001) sebagai *Head of Internal Audit, Oxford University Press, Oxford, UK* mengemukakan tentang *Genesis of a profession: towards professional status for internal auditing*, bahwa adanya keberhasilan *Institute of Internal Auditors (IIA)* dalam meningkatkan status profesional, dan IIA telah membuat kerangka kerja profesional bagi internal audit.

Penelitian sehubungan antara auditor internal dengan *Good Government Governance* di Indonesia antara lain dilakukan oleh Sarilena (2004) pada badan pengawasan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan judul Pengaruh Profesionalitas aparat badan pengawasan daerah terhadap pelaksanaan *good governance*. Hasil penemuannya menyatakan bahwa profesionalisme aparat Bawasda yang terdiri dari kompetensi, independensi, kecermatan profesi, kerahasiaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *good governance* di Jawa Barat baik secara simultan dan parsial.

Berdasarkan landasan teori yang ada, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut: “kompetensi aparat pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah berpengaruh terhadap penerapan *Good Government Governance (GGG)*”

III.METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Studi pada penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis (*hypotheses testing*) yang dikembangkan berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang Akuntansi Sektor Publik (*Public Sector Accounting*)
2. Jenis investigasi (jenis penelitian), pada penelitian ini adalah studi kausal (*causal study*), yaitu penelitian yang menyatakan adanya hubungan sebab akibat antara variabel independen.
3. Tingkat intervensi peneliti, pada penelitian ini peneliti tidak memiliki kemampuan dalam mengintervensi, baik berupa mengendalikan maupun memanipulasi variabel, karena variabel tersebut sudah ada atau *ex post facto* (Cooper *et al.*, 2006:141)
4. Konteks studi (situasi studi), pada penelitian ini dilakukan studi lapangan pada SKPD di Instansi Pemda Propinsi Riau.

5. Unit Analisis pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/ Kota dan Propinsi di Riau.
6. Horizon Waktu dari penelitian ini adalah *one shot study atau cross sectional study*, yaitu studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan selama periode satu tahun (tahun 2010) dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

Operasionalisasi Variabel

Pada operasionalisasi variabel, masing-masing variabel diuraikan definisi operasionalnya.

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu:

1. Variabel bebas (*eksogen*) terdiri dari variabel:
 - a. Kompetensi aparatur pemerintah daerah (X_1)
Variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah diukur dari instrumen Cheng *et al.* (2002) kemudian dikembangkan oleh Nur Afiah (2004), yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya instrumen tersebut disesuaikan dengan kondisi riil pada instansi pemerintah daerah dan telah dilakukan pre test pada bulan februari terhadap beberapa SKPD yang ada di Propinsi Riau. Dimensi kompetensi meliputi empat komponen (Cheng *et al.*, 2002) meliputi *functional expertise, Broad sector prespective, leadership qualities, and personal atributes*. Kemudian dikembangkan menjadi dimensi Pengetahuan ($X_{1.1}$), Pengalaman ($X_{1.2}$), Mutu kepemimpinan berupa etika subjektif dan etika objektif ($X_{1.3}$) dan keterampilan ($X_{1.4}$) (Nur Afiah, 2004)
 - b. Profesionalisme APIP(X_3)
Variabel profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah diukur dari instrumen Kalbers dan Fogarty (1995) yang kemudian dikembangkan oleh Sumardi (2001), Abdul Fatah (2002). Selanjutnya diukur dengan perubahan-perubahan sehingga sesuai dengan kondisi riil lingkungan objek yang diteliti dalam hal ini di lingkungan instansi pemerintah daerah, dan telah dilakukan pre test terhadap APIP dalam penelitian ini adalah inspektorat daerah Propinsi Riau. Konsep profesionalisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep Kalbers dan Fogarty (1995) yang terdiri dari lima dimensi yaitu (1) Dedikasi (*dedication*); (2) Kewajiban sosial (*social obligation*); (3) Kebutuhan akan otonomi (*autonomy demand*); (4) Keyakinan terhadap peraturan sendiri (*self regulation*); (5) Hubungan dengan sesama profesi (*community affiliation*).
2. Variabel tidak bebas (*endogen*) terdiri dari penerapan Good Government Governance (GGG) (Y). Variabel Penerapan Good Government Governance (GGG) diukur dari instrumen BPKP (2000) dikembangkan oleh Nur Afiah (2004) dan Taufik (2009) yang kemudian dikembangkan lagi sendiri oleh peneliti, yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian instrumen tersebut disesuaikan dengan kondisi riil pada instansi pemerintah daerah dan telah dilakukan pre test terhadap SKPD yang ada di Propinsi Riau. Dimensi Good Government Governance (GGG) menurut BPKP (2000) meliputi tiga dimensi, yaitu (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, dan (3) Partisipasi Masyarakat.

Populasi dan Sampel

Populasi sasaran (target population) dalam penelitian ini adalah seluruh instansi pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi di Riau yang diperiksa oleh Inspektorat Daerah Propinsi Riau pada tahun 2010. Data di lapangan menunjukkan jumlah populasi dari SKPD yang diperiksa oleh Inspektorat Tahun 2010 sebanyak 115 SKPD, dengan rincian 37 SKPD di lingkungan Provinsi Riau dan 78 di Kabupaten/Kota, yang terbagi atas daerah induk 31 SKPD dan daerah pemekaran 47 SKPD.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling daerah/area (*cluster sampling*), dengan alasan bahwa sumber data sangat luas. Tetapi karena Propinsi dan Kabupaten itu berstrata (tidak sama), maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling (Sugiyono, 2011:83). Sehingga pada penelitian ini untuk menarik sampel dari populasi agar proporsional peneliti menggunakan teknik *Proportionate Stratified Cluster Random Sampling*. Populasi penelitian ini dibagi atas 2 (tiga) kelompok, yaitu: 1). Propinsi . 2). Kabupaten induk dan kabupaten pemekaran.

Sampel minimal pada penelitian ini adalah sebanyak 54 SKPD, yang selanjutnya dibagi secara proporsional ke propinsi sebanyak 17 SKPD, kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pemekaran sebanyak 37 SKPD. Atas alasan untuk mengantisipasi tidak tercapainya sampel minimal, peneliti menyebarkan kuesioner pada Provinsi sebanyak 25 kuesioner, dan terkumpul kembali 23 kuesioner. Pada Kabupaten/kota Induk dan Kabupaten/kota pemekaran disebarkan 40 kuesioner dan terkumpul kembali 34 kuesioner. Sehingga jumlah sampel yang terkumpul berjumlah 57 SKPD.

Prosedur Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Data primer, diperoleh dengan cara pemberian kuesioner penelitian dan wawancara langsung kepada responden penelitian, dalam hal ini Kepala Dinas/Badan dan sekretaris Kepala Dinas/Badan, serta Auditor Inspektorat Daerah Propinsi.
2. Data Sekunder, yang diperoleh antara lain dari Inspektorat berupa PKPT pada tahun 2010, dan ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku.

Teknik Pengujian dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari para responden di uji validitas dan reliabilitasnya untuk menghindari hal-hal yang bias dan meragukan keabsahan penelitian ini. Uji validitas dengan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin-Measure of Sampling Adequacy (KMO-MSA)* dan reliabilitas dengan menggunakan *cronbach's alpha*.

Setelah dilakukan pengujian kualitas data, Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Struktural Equation Modelling (SEM)* berbasis *component atau variance* yang terkenal dengan *Partial Least Square (PLS)*.

IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi skor tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor penilaian responden, yaitu: apabila rata-rata skor 1,0 - 2,99 (Rendah/kurang baik), 3,0 - 5,99 (Sedang/cukup baik) dan 6,0 - 7,0 (Tinggi/baik)

1. Variabel Kompetensi Aparatur Pemda

Variabel kompetensi aparatur Pemda diukur dengan 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, pengalaman, etika subjektif dan keterampilan. Rata-rata skor data yang dihasilkan untuk dimensi pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam akuntansi masih rendah, hanya implementasi dimensi etika subjektif para pimpinan SKPD bernilai baik.

2. Variabel Profesionalisme APIP

Variabel profesionalisme APIP diukur dengan 5 dimensi, hasil rata-rata skor data setiap dimensi cukup baik.

3. Variabel Penerapan Good Government Governance

Variabel *Good Government Governance* diukur dengan 3 dimensi, yaitu dimensi transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hasil rata-rata skor data untuk dimensi transparansi cukup baik, dan dimensi partisipasi dan akuntabilitas baik.

Model Pengukuran

1. Model Pengukuran Variabel Kompetensi Aparatur pemda

Variabel Kompetensi Aparatur Pemda diukur menggunakan 4 variabel manifes, bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam membentuk variabel Kompetensi Aparatur Pemda dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Outer model variabel Kompetensi Aparatur Pemda (ξ_1)

| Variabel Manifes | Loding Faktor | <i>Measurement Model</i> | <i>t_{hitung}</i> |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Pengetahuan ($X_{1.1}$) | 0,831 | $X_{11} = 0,831 \xi_1 + 0,309$ | 4,151 |
| Pengalaman ($X_{1.2}$) | 0,851 | $X_{12} = 0,851 \xi_1 + 0,276$ | 7,972 |
| Etika Subjektif ($X_{1.3}$) | 0,639 | $X_{13} = 0,639 \xi_1 + 0,592$ | 5,655 |
| Keterampilan ($X_{1.4}$) | 0,832 | $X_{14} = 0,832 \xi_1 + 0,307$ | 10,241 |

Diperoleh nilai Loding faktor untuk 4 variabel manifes dari laten variabel Kompetensi Aparatur Pemda (X_1) yaitu Pengetahuan diperoleh sebesar 0,831 dengan t_{hitung} sebesar 4,151, Pengalaman diperoleh sebesar 0,851 dengan t_{hitung} sebesar 7,972, Etika Subjektif diperoleh sebesar 0,639 dengan t_{hitung} sebesar 5,655 dan Keterampilan diperoleh sebesar 0,832 dengan t_{hitung} sebesar 10,241.

Nilai t hitung seperti terlihat pada tabel lebih dari 1,96 sehingga dapat dikatakan bahwa keempat manifes variabel yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Kompetensi Aparatur Pemda (X_1).

2 Model Pengukuran Variabel Profesionalisme APIP

Variabel Professionalisme APIP diukur menggunakan 5 variabel manifes, bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam membentuk variabel Professionalisme APIP dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Outer model variabel Profesionalisme APIP (ξ_2)

| Variabel Manifes | LodingFaktor | <i>Measurement Model</i> | <i>t_{hitung}</i> |
|--|--------------|--------------------------------|---------------------------|
| Dedikasi ($X_{2.1}$) | 0,757 | $X_{31} = 0,757 \xi_3 + 0,428$ | 6,999 |
| Kewajiban sosial ($X_{2.2}$) | 0,616 | $X_{32} = 0,616 \xi_3 + 0,620$ | 5,660 |
| Kebutuhan akan otonomi ($X_{2.3}$) | 0,734 | $X_{33} = 0,734 \xi_3 + 0,461$ | 5,856 |
| Keyakinan terhadap peraturan sendiri ($X_{2.4}$) | 0,682 | $X_{34} = 0,682 \xi_3 + 0,535$ | 6,985 |
| Afiliasi komunitas ($X_{2.5}$) | 0,816 | $X_{35} = 0,816 \xi_3 + 0,334$ | 8,055 |

Diperoleh nilai Loding faktor untuk 5 variabel manifes dari laten variabel Profesionalisme APIP (X_2) yaitu Dedikasi diperoleh sebesar 0,757 dengan t_{hitung} sebesar 6,999, Kewajiban sosial diperoleh sebesar 0,616 dengan t_{hitung} sebesar 5,660, Kebutuhan akan otonomi diperoleh sebesar 0,734 dengan t_{hitung} sebesar 5,856, Keyakinan terhadap peraturan sendiri diperoleh sebesar 0,682 dengan t_{hitung} sebesar 6,985 dan Afiliasi komunitas diperoleh sebesar 0,816 dengan t_{hitung} sebesar 8,055.

Nilai t hitung seperti terlihat pada tabel lebih dari 1,96 sehingga dapat dikatakan bahwa kelima manifes variabel yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Professionalisme APIP (X_2).

3 Model Pengukuran Variabel Good Government Governance

Variabel *Good Government Governance* diukur menggunakan 3 variabel manifes, bobot faktor masing-masing variabel manifes dalam membentuk variabel *Good Government Governance* dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Outer model variabel *Good Government Governance* (η)

| Variabel Manifes | Loding Faktor | <i>Measurement Model</i> | t_{hitung} |
|-------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Transparansi (Y_1) | 0,773 | $Y_1 = 0,773 \eta + 0,402$ | 10,265 |
| Partisipasi (Y_2) | 0,799 | $Y_2 = 0,799 \eta + 0,362$ | 13,097 |
| Akuntabilitas (Y_3) | 0,875 | $Y_3 = 0,875 \eta + 0,234$ | 11,353 |

Diperoleh nilai Loding faktor untuk 3 variabel manifes dari laten variabel *Good Government Governance* (Y) yaitu Transparansi diperoleh sebesar 0,773 dengan t_{hitung} sebesar 10,265, Partisipasi diperoleh sebesar 0,799 dengan t_{hitung} sebesar 13,097 dan Akuntabilitas diperoleh sebesar 0,875 dengan t_{hitung} sebesar 11,353.

Nilai t hitung seperti terlihat pada tabel lebih dari 1,96 sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga manifes variabel yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel *Good Government Governance* (Y).

Pengujian Model Struktural

1. *Convergent validity*

Convergent validity dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang diperoleh.

Tabel 4
Nilai *Convergent validity* Laten Variabel

| | Kompetensi | Professionalisme | GGG |
|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| X11 | 0,831356 | -0,117844 | 0,354324 |
| X12 | 0,850941 | 0,029048 | 0,314428 |
| X13 | 0,638715 | 0,003764 | 0,208981 |
| X14 | 0,832394 | 0,199666 | 0,399601 |
| X21 | -0,048171 | 0,756585 | 0,397402 |
| X22 | 0,151925 | 0,616444 | 0,329176 |
| X23 | -0,012572 | 0,734209 | 0,252835 |
| X24 | 0,005048 | 0,681897 | 0,298864 |
| X25 | 0,067591 | 0,815868 | 0,421418 |
| Y1 | 0,316907 | 0,478575 | 0,773090 |
| Y2 | 0,303186 | 0,314420 | 0,798968 |
| Y3 | 0,392905 | 0,368440 | 0,875207 |

Hasil perhitungan pada tabel terlihat korelasi konstruk laten berupa kompetensi aparatur Pemerintah Daerah, profesionalisme APIP, penerapan GGG dengan indikator-indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten tersebut tepat dibentuk oleh masing-masing indikatornya.

2. *Discriminan validity*

Tabel 5
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) Laten Variabel

| Variabel | AVE |
|---|----------|
| Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah (ξ_2) | 0,629022 |
| Profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah (ξ_3) | 0,524422 |
| <i>Good government governance</i> (η_1) | 0,667335 |

Discriminan validity melihat bagaimana validitas dari konstruk yang terbentuk dibandingkan dengan konstruk yang lainnya berdasarkan nilai *Average Variance Extracted*

(AVE). Nilai AVE untuk konstruk X1 (Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah) sebesar 0,629022, konstruk X2 (Profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah) sebesar 0,524422 dan konstruk Y (*Good government governance*) sebesar 0,667335 memiliki AVE sudah baik lebih dari 0,5. Memiliki makna bahwa informasi yang terkandung pada variabel manifes semua indikator dapat terwakili dalam variabel laten

3. *Composite reliability*

Untuk konstruk yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan, diperoleh Nilai *Composite Reliability* sebagai berikut :

Tabel 6
Nilai *Composite Reliability* Laten Variabel

| Variabel | <i>Composite Reliability</i> |
|---|------------------------------|
| Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah (ξ_1) | 0,870150 |
| Profesionalisme APIP (ξ_2) | 0,845330 |
| <i>Good government governance</i> (η) | 0,857166 |

Composite Reliability dari indikator laten variabel Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah sebesar 0,870150, variabel Profesionalisme APIP sebesar 0,845330, variabel *Good government governance* sebesar 0,857166, lebih besar dari yang direkomendasikan sebesar 0,7. Artinya laten variabel Kompetensi aparatur Pemerintah, Profesionalisme APIP dan *Good Government Governance* memiliki konsisten yang tinggi.

4. R-square untuk konstruk dependen

Tabel 7
Nilai R-square

| Uraian | R Square |
|--|----------|
| <i>Good government governance</i> (η) | 0,388262 |

R-square sebesar 0,388262 menunjukkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Profesionalisme APIP memiliki pengaruh terhadap penerapan *Good Government Governance*/GGG sebesar 38,83%.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Tabel 8

Besar Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah dan Profesionalisme APIP terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*/GGG)

| Variabel | Koefesien Jalur | Pengaruh Langsung | Pengaruh Tdk Langsung | Total |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------|
| Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah | 0,394 | 15,5% | 0,9% | 16,4% |
| Profesionalisme APIP | 0,464 | 21,5% | 0,9% | 22,4% |
| Total Pengaruh Secara Simultan= | | | | 38,8% |

Sumber: Data Riset diolah kembali

Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme APIP terhadap penerapan *Good Government Governance* (GGG) sebesar 38,8%, dan sisanya sebesar 61,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Diantara kedua variabel eksogen, profesionalisme

APIP memberikan kontribusi yang paling besar 22,4% terhadap penerapan *Good Government Governance* (GGG).

Secara langsung variabel kompetensi aparatur Pemda memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 15,5% terhadap penerapan *good government governance*. Kemudian pengaruh secara tidak langsung karena hubungannya dengan profesionalisme APIP sebesar 0,9%. Secara simultan kompetensi aparatur Pemda memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 16,4% dalam meningkatkan penerapan *Good Government Governance*. Hasil riset tersebut mendukung hasil riset dari Cornforth *et al.* (1998) dan Nur Afiah (2004) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompetensi aparatur pemda terhadap penerapan *Good Government Governance*.

Selanjutnya secara langsung variabel profesionalisme APIP memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 21,5% terhadap penerapan *Good Government Governance*. Kemudian pengaruh secara tidak langsung karena hubungannya dengan kompetensi aparatur Pemda sebesar 0,9%. Secara simultan profesionalisme APIP memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 22,4% dalam meningkatkan penerapan *Good Government Governance*. Hasil riset tersebut mendukung hasil riset dari Philomena Leung *et al.* (2009), Sarilena Oktavia (2004) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Profesionalisme APIP terhadap penerapan *Good Government Governance*.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemda Terhadap Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Government Governance*/GGG)

Dihipotesiskan bahwa Kompetensi Aparatur Pemda mempengaruhi penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*/GGG). Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut melalui hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0.\gamma_1 = 0$: Secara parsial Kompetensi Aparatur Pemda tidak berpengaruh terhadap GGG

$H_a.\gamma_1 \neq 0$: Secara parsial Kompetensi Aparatur Pemda berpengaruh terhadap GGG

Tabel 9

Uji Signifikansi Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemda Terhadap Penerapan GGG

| Koefesien Jalur | t-hitung | t-kritis | Kesimpulan |
|-----------------|----------|----------|------------|
| 0,395 | 2,483 | 1,96 | Signifikan |

Sumber: Data Riset diolah kembali

Nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel Kompetensi aparatur Pemda terhadap Penerapan *Good Government Governance*/GGG diperoleh sebesar 2,483. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{kritis} maka disimpulkan bahwa Kompetensi aparatur Pemda berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Government Governance*/GGG. Mendukung penelitian Cornforth, C.J and Edwards. C. (1998) dan Nur Afiah (2004).

Pengaruh Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Government Governance*/GGG

Dihipotesiskan bahwa Profesionalisme APIP mempengaruhi penerapan *Good Government Governance*/GGG. Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut melalui hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0.\gamma_2 = 0$: Secara parsial Profesionalisme APIP tidak berpengaruh terhadap penerapan GGG

$H_a.\gamma_2 \neq 0$: Secara parsial Profesionalisme APIP berpengaruh penerapan GGG

Tabel 10

Uji Signifikansi Pengaruh Profesionalisme APIP Terhadap Penerapan GGG

| Koefesien Jalur | t-hitung | t-kritis | Kesimpulan |
|-----------------|----------|----------|------------|
| 0,464 | 4,149 | 1,96 | Signifikan |

Sumber: Data Riset diolah kembali

Nilai t_{hitung} koefisien jalur dari variabel Profesionalisme APIP terhadap Penerapan *Good Government Governance*/GGG diperoleh sebesar 4,149. Karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{kritis} maka disimpulkan bahwa Profesionalisme APIP berpengaruh signifikan terhadap Penerapan *Good Government Governance*/GGG. Relevan dengan penelitian Leung et al. (2009), Jenny G & Pamella (2006), Cheung et al. (1997), Sarilena Oktavia (2004)

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Penelitian

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dengan signifikansi level sebesar 5% dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Government Governance*/GGG.
2. *Governance theory* dianggap relevan diterapkan pada instansi pemerintah daerah, karena *Governance* merupakan bentuk baru menuju *New Public Management (NPM)* untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menemukan keterbatasan pada penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Penelitian ini adalah studi kasus yang menjelaskan fenomena yang ada di Provinsi Riau, sehingga memiliki keterbatasan tidak dapat digeneralisir kecuali untuk Provinsi yang memiliki karakteristik yang sama. Dengan demikian, pola penelitian dan instrumen yang sama perlu dilakukan untuk Provinsi lain, sehingga dapat ditemukan pula peningkatan akuntabilitas di Provinsi yang lain
2. Mengingat ε (error) yang cukup besar terhadap GGG sebesar 61,2%, hal ini menunjukkan keterbatasan variabel yang diobservasi dalam model penelitian ini. Bagi peneliti yang tertarik dengan topik serupa bisa menambahkan sistem *good governance* secara makro berupa peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Saran Bagi Akademisi

Bagi peneliti lain yang berminat mendalami pelaksanaan *good governance* diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain di luar kompetensi aparatur pemda dan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah. Faktor-faktor lain tersebut antara lain seperti sistem akuntansi pemerintahan, profesionalisme auditor eksternal pemerintah, ketentuan-ketentuan yang berlaku dan lain sebagainya. Selanjutnya penelitian ini dapat memberi masukan langsung kepada pemerintah daerah demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Saran Bagi Aparatur Pemerintah Daerah

Agar pelaksanaan audit sektor publik dapat dilakukan lebih baik, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Pimpinan SKPD dituntut kesadaran tentang perlunya pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan di bidang teknis akuntansi sektor publik sehingga mereka menyadari dan selanjutnya akan mencapai kompetensi tertentu sesuai kebutuhan. Mengingat secara keseluruhan pada SKPD yang diteliti tingkat pengetahuan, pengalaman dan keterampilan akuntansinya masih rendah.
2. Agar tercapainya *good governance* diperlukan aparat pemda yang lebih sensitif terhadap persoalan masyarakat, peningkatan kinerja dari aparat itu sendiri melalui peningkatan pendidikan dan keahlian serta penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah itu sendiri. Penerapan etika pada aparat pemda akan meningkatkan tingkat kejujuran, tingkat rasionalitas, tingkat keberanian, tingkat tanggung jawab terhadap mutu keputusan/kebijakan dan tingkat tanggung jawab terhadap dampak keputusan/kebijakan pada kehidupan orang lain

Saran Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Saran bagi aparat pengawas intern pemerintah dalam mewujudkan *good governance* adalah:

1. Pemeriksaan Inspektorat sebaiknya lebih menekankan pada *outcome* agar dapat diketahui manfaat dari program yang telah dijalankan
2. Evaluasi lebih ditekankan pada penilaian tindakan pimpinan dalam pengendalian intern
3. Perlunya sinergi pengawasan antara sesama pengawas intern
4. APIP perlu menyampaikan masukan-masukan kepada kepala daerah minimal 3 bulan sekali, agar dapat diperbaiki dan ditindaklanjuti pada tahun yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi kedua, Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Bastian, Indra. 2011, *Audit Sektor Publik*, Edisi Dua, Salemba Empat, Jakarta.
- BPK-RI.2004. Panduan manajemen Pemeriksaan. Jakarta
- Boutler, Nick, Murray Dalziel, Jackie Hill. 1999. *People and Competency, the Route to Competitive Advantage*. Crest Publishing House. New Delhi
- Budiono,2010. Press release: Penguatan akuntabilitas keuangan negara yang handal, Transparan dan akuntabel, Melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),16juni2010,http://www.bpkp.go.idpublicuploadunitpusat...Release_16Juni2010.pdf
- Cheng,Rita H., John H.Engstrom. Susan C. Kattelus, Fall.2002, *Educating government Financial Managers: University collaboration between business and public administration*, The Journal of Government Financial Management,Alexandria: vol 51, Iss.3, page 10, 5 pages. <http://gateway.proquest.com>
- Cornforth, C. J. and Edwards, C. (1998). “*Good Governance: developing effective board-management relations in public and voluntary organizations*”. CIMA Publishing, London, UK. <http://gateway.brint.com>
- Diamond, Jack (2002) “*The role of Internal Audit in Government Financial Management: an International Perspektif*”, IMF working paper, <http://gateway.brint.com>
- Enceng, Liestyodono.BI dan Purwaningdyah. MW. 2008. “*Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance*”, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Volume 2 No.1 Juni 2008, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN, Jakarta
- Goodwin, Jenny (2004) *A comparison of internal audit in the private and public sectors*, Managerial Auditing Journal Vol. 19 No. 5, 2004 pp. 640-650 Emerald Group Publishing Limited <http://gateway.proquest.com>
- Goodwin Jenny -Steward. Pamela kent. 2006. *The use of internal audit by Australian Companies*. Manajerial Auditing Journal. Brad fort. Vol.21 Iss.1/2;pg.81 <http://gateway.proquest.com>
- Hood, Cristopher and Lodge,martin (2004). “*Competency, Bureaucracy, and Public Management Reform: A Comparative Analysis*” Governance. <http://gateway.brint.com>
- Kalbers Lawrence. P and Timhoty J. Fogarty. 1995. “*Profesionalism and It’s Consequences: A Studynof Internal Auditors*”. *A Journal of Practice and Theory*. Spring. Vol. 14. No.1.pp. 64-85 <http://gateway.proquest.com>
- Kurtz. Marcus J and Schrank . Andrew (2007), *Growth and Governance: Models,Measures, and Mechanisms*, *The Journal of Politics*, Vol. 69, No. 2, May 2007, pp. 538–554. <http://gateway.brint.com>

- Leung, Philomena, et.al (2009). *The Role Of Internal Audit In Corporate Governance And Management*. The Institute of Internal Auditors Inc Research Foundation, <http://gateway.brint.com>
- Nur Afiah, Nunuy 2004. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, serta Kualitas Informasi Keuangan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
- O'Regan, David (2001), *Genesis of a profession: towards professional status for internal auditing*, Managerial Auditing Journal, <http://gateway.brint.com>
- PERC. 2010. *PERC The Annual Graft Ranking Survey*. www.perc.com
- Sarilena, Dessy. 2004. Pengaruh Profesionalitas Aparat Badan Pengawasan Daerah Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*. Bandung, Disertasi. Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran
- Sembodo, Eko. 2009, Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau <http://pekanbaru.bpk.go.id>
- Stoker, G. 1998. "Governance as Theory: Five Propositions." *International Social Science Journal*, Vol. 50, No. 1: 17-28.
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Penerbit ALFABETA. Bandung
- Taufik, Taufeni 2009, *The influence of internal auditor, exsternal auditor, and local house of representative in straightening of good local government governance and its impact to prevention of fraud*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
- The Institute of Internal Auditors (2006), "The Role of Auditing in Public Sector Governance", *Professional Guidance Setting the Standart*, <http://brint.com>
- The World Bank Report 1999 – 2000, *Decentralization Rethinking Government*.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance* (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. UI-Press
- Transparency International Indonesia. 2010. Indeks persepsi korupsi tahun 2010 Di 50 kabupaten / kota di Indonesia. www.ti.or.id
- Utusan riau, 2011, issuu.com/prasena/docs/haluanriau31okt2011
- Wahyudi, 2010. "Pemberdayaan Peran Audit Internal dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Sektor Publik, [www://pusdiklatwas.bpkp.go.id](http://pusdiklatwas.bpkp.go.id)